

Donny Yoesgiantoro: Pemerintah Perlu Tegas soal Energi Terbarukan

Energi bersifat krusial karena berperan sangat penting dalam politik dan pemerintahan, perekonomian, kehidupan sosial, serta pertahanan dan keamanan. Ketahanan energi dalam lingkup ketahanan ekonomi pun jadi fondasi ketahanan nasional. Berikut perbincangan wartawan *Suara Merdeka* **Arie Widiarto** dengan pengamat kebijakan energi dan lingkungan dari Universitas Pertahanan (Unhan) Jakarta, **Dr Ir Donny Yoesgiantoro MM MPA**.

Bagaimana Anda melihat kondisi ketahanan energi di Tanah Air?

Konsep ketahanan nasional secara keseluruhan harus ditunjang ketahanan energi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebab, energi merupakan penggerak pembangunan. Saat ini memang berbeda dari dulu. Dulu energi menjadi komoditas, sedangkan sekarang energi menjadi modal pembangunan.

Apa landasan dari ketahanan energi sebagai ketahanan nasional?

Landasan hukum atau aturan sudah jelas tertuang dalam kebijakan energi nasional seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi yang merupakan energi terbarukan.

Jadi landasan hukum bagi kebi-

jakan energi nasional sudah jelas. Maka seharusnya dari situ tujuan ke depan bagaimana kebijakan energi kita sudah ada. Landasan itu kemudian dijabarkan dalam program dan proyek seperti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Pemerintah sudah sangat jelas dalam membuat program ketahanan energi ke depan.

Apakah pelaksanaan di lapangan apakah sudah sesuai dengan rencana?

Penggunaan energi baru dan terbarukan sampai akhir 2017 masih sekitar 7,7 persen. Padahal, target porsi energi baru dan terbarukan dalam kebijakan energi nasional 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050.

Ke depan, pemerintah tentu perlu bekerja keras demi menggapai bauran energi baru dan terbarukan yang diharapkan bisa mencapai 23 persen dalam kurun delapan tahun mendatang. Pencapaian angka itu tentu tidak mudah, mengingat ketergantungan masyarakat pada energi primer masih cukup besar.

Apa yang menjadi kendala bagi percepatan penggunaan energi non-fosil?

Ketahanan energi erat berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi. Memang saat ini kita belum bisa keluar dari ketergantungan besar pada bahan bakar fosil, seperti gas, batu bara, dan minyak. Namun se-

mua juga paham, energi fosil akan habis suatu saat kelak. Sekarang mungkin masih cukup, tetapi 25 tahun atau 50 tahun lagi bukan tidak mungkin bakal habis.

Perlu ketegasan pemerintah untuk mencapai hal itu. Ketegasan itu salah satunya dengan menekan subsidi agar masyarakat makin paham energi fosil akan habis.

Kita tahu, Indonesia punya sumber kekayaan alam luar biasa serta demografi dan geografi yang bagus. Nah, itulah sebenarnya yang bisa menjadi modal dasar kita untuk membuat sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Sayangnya, selama ini kita masih terlena dengan kemelimpahan energi fosil. Batu bara, misalnya, tinggal ambil. Minyak dan lain-lain masih tersedia.

Namun satu hal perlu kita perhatikan, yakni sumber-sumber energi fosil kini menipis. Lihat saja di Riau, Kalimantan, dan beberapa daerah lain, stok sudah makin sulit kita peroleh. Sementara itu, kontribusi ke masyarakat sekitar juga tidak terlihat.

Apakah selama ini pemerintah kurang tegas?

Memang dalam kondisi seperti ini butuh regulasi pemerintah yang sedikit imemaksa perpindahan konsumsi energi primer ke konsumsi energi terbarukan. Misalnya, dengan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) akan tercipta inisiatif untuk menciptakan teknologi berbasis energi nonfosil yang lebih efisien. Contohnya, de-

ngan mendorong kendaraan dan transportasi umum berbahan bakar nonfosil.

Jika kebijakan itu dilakukan secara konsisten, bukan tidak mungkin target bauran energi pada 2050 sebesar 31 persen bisa terlampaui. Jadi masih ada harapan, target meningkatkan porsi energi terbarukan di dalam bauran energi bisa tercapai, asal ada keberpihakan regulasi yang mendorong. Perlu meningkatkan dalam wujud kebijakan dan strategi yang bersifat operasional.

Apa yang membuat pengembangan energi terbarukan berkesan lambat?

Saat ini pemerintah sangat masif membangun infrastruktur di berbagai daerah sampai ke daerah-daerah pelosok. Namun satu hal perlu kita garisbawahi, pengembangan energi terbarukan justru tidak terlihat.

Salah satu kendala adalah untuk membuat pembangkit berasal dari sumber energi nonfosil berbiaya besar. Itu wajar karena teknologi yang diperlukan dan belum diproduksi secara masif sehingga berbiaya tinggi. Namun kalau hanya melihat dari sudut biaya investasi, rasanya kurang tepat. Sebaiknya kita melihat manfaat jangka panjangnya.

Sebab, investasi pembangkit energi dari sumber daya terbarukan seperti air, panas bumi, dan tenaga surya akan dirasakan berkelanjutan beberapa dekade mendatang. Manfaatnya juga akan dirasakan anak cucu kita. Hal itulah yang perlu kita sadari bersama karena kita

hidup bukan untuk saat ini. Itulah konsep pembangunan berkelanjutan.

Ancaman apa yang bisa terjadi jika pembangunan energi berkelanjutan diabaikan?

Ya, akhimya mau tidak mau kita harus impor bahan baku energi. Dampaknya, tentu harga energi mahal, sehingga akan memengaruhi

juga harga produk dan biaya hidup makin tinggi. Oleh karena itu, kita harus melihat jauh ke depan. Perlu juga kemauan para pemangku kepentingan. Energi adalah penggerak roda perekonomian. Jika untuk mendapat bahan baku saja sudah mahal dan sulit, bisa berdampak luar biasa terhadap seluruh sendi kehidupan. (44)

Dr Ir Donny Yoesgiantoro MM MPA

Lahir: Semarang, 16 April 1967

Pendidikan

- » S-1 Fakultas Teknik Universitas Trisakti Jakarta (1990)
- » S-2 Manajemen Universitas Atmajaya Jakarta (1996)
- » S-2 Master of Public Administration Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura (2008)
- » S-3 Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia/UI (2012)
- » Program Pendidikan Singkat Angkatan XIX Lemhanas 2013

Organisasi

- » Anggota Bidang Hubungan Antarlembaga Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL)
- » Ketua Umum Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan/Perwaku (2011-2015)
- » Ketua Komite Negara-Negara Nordic Kadin Indonesia (2011-2015)
- » Ketua Komite Tetap Pengelolaan Lingkungan Bersih dan Pemanfaatan Limbah Kadin Indonesia (2015-2019)
- » Ketua Pusat Studi Ketahanan Energi Program Studi Ketahanan Energi Universitas Pertahanan Indonesia (unhan)

Pekerjaan

- » Dosen Unhan Jakarta
- » Pengajar Program Pascasarjana UI
- » Pengajar Program Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro (Undip).



TONTON VIDEONYA di
<https://www.suaramerdeka.com/smtv>
 atau scan QR Code

